

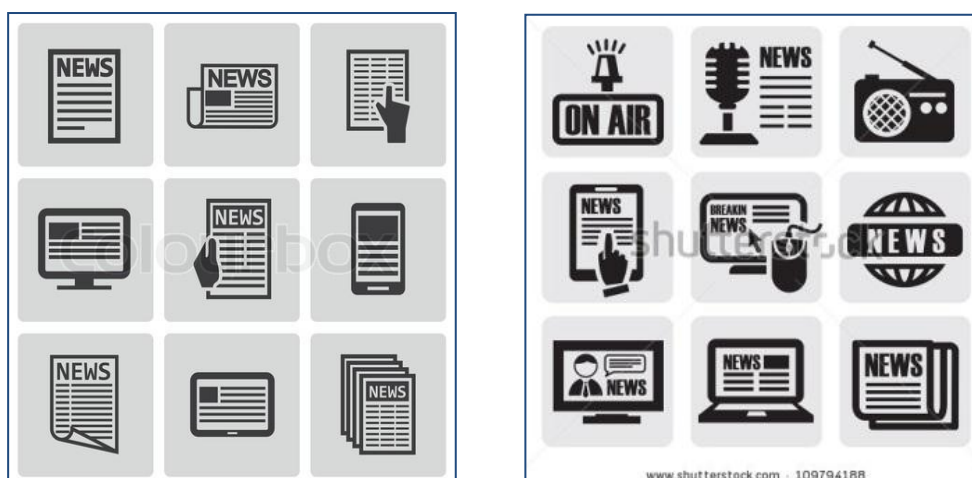


**Kementerian PPN/  
Bappenas**

## **e-Newspaper Media Online**

Ekonomi

Senin, 6 Oktober 2014



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan  
Jakarta, Bappenas  
2014**

## **Daftar Isi**

1. KETIMPANGAN PENDAPATAN AKAN PANCING GEJOLAK (*Media Online Media Indonesia*)
2. KEYAKINAN KONSUMEN MENURUN ANTISIPASI KENAIKAN HARGA (*Media Online Indonesia Finance Today*)
3. STRUKTUR BELANJA NEGARA AKAN DITINJAU ULANG (*Media Online Indonesia Finance Today*)

**Tumbuhnya Masalah Ketimpangan di Indonesia**



# Ketimpangan Pendapatan akan Pancing Gejolak

Sebanyak 85 orang terkaya di dunia menguasai kekayaan setara kombinasi kekayaan 3,6 miliar penduduk dunia.

**RUKY NOOR ALAM**

**K**ETIMPANGAN pendapatan yang terjadi di Indonesia semakin parah dan meningkat dalam satu dekade terakhir, terutama antara Jawa dan luar Jawa. Bila tidak segera ditanggulangi, ketimpangan tersebut akan menimbulkan gejala sosial.

Ekonom Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih mengemukakan hal tersebut ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Tren memburuknya ketimpangan kesejahteraan ekonomi memang terjadi di tingkat global. Pekan lalu, organisasi kerja sama ekonomi Uni Eropa, OECD, merilis hasil penelitian yang menunjukkan ketimpangan

global saat ini setara dengan pada masa sebelum Revolusi Industri atau hampir dua abad yang lalu (Media Indonesia, Sabtu 4/10).

Namun, menurut Sri, keadaan di Indonesia lebih mengkhawatirkan. "Sudah semakin parah, baik itu antara Jawa dan luar Jawa maupun antara perkotaan dan perdesaan."

Sri menambahkan ketimpangan yang semakin tajam terlihat dari koefisien Gini Indonesia yang kini berada pada posisi 0,41. Rasio itu cenderung terus meningkat ketimbang pada periode 2000-an yang berada di level 0,3.

Koefisien Gini mengukur kondisi ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara. Semakin tinggi nilai koefisien Gini, ketimpangan pendapatan semakin lebar.

Ketimpangan juga lebih parah daripada dua dekade yang lalu. Pada 1992, koefisien Gini Indonesia di level 0,34.

Penanggulangan masalah ketimpangan pendapatan, menurut Sri, memerlukan langkah konkret. "Tidak boleh dibiarkan semakin tajam karena dapat menimbulkan

keresahan dan gejala sosial." Pemerintah diminta untuk benar-benar menggalakkan pembangunan di luar Jawa, bukan sekadar jargon.

Selain itu, kata Sri, pemerintah harus membuka kesempatan pekerjaan lebih baik bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketimpangan pendapatan semakin mendapatkan sorotan di dunia internasional. Studi OECD dalam laporan utama tentang perkembangan kesejahteraan global memperingatkan bahwa hal itu menjadi salah satu perkembangan yang paling mengkhawatirkan, dihitung sejak 1820-an.

"Peningkatan ketimpangan pendapatan pada skala global ialah hal yang paling signifikan dan mengkhawatirkan jika diukur dari perkembangan perekonomian dalam 200 tahun terakhir," sebut OECD dalam laporan mereka.

Di Eropa Timur, kesenjangan si kaya dan si miskin naik drastis pada 1990-an seiring dengan kejatuhan komunisme. Demikian pula di Tiongkok.

**Pacu pemerataan**  
 Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam pidatonya pekan lalu juga merisaukan masalah ketimpangan global. Ia menekankan sangat pentingnya membantu negara-negara berpendapatan rendah untuk meningkatkan perekonomian.

Kim mengutip laporan Oxfam Internasional yang mengungkapkan 85 orang terkaya di dunia menguasai kekayaan setara kombinasi kekayaan 3,6 miliar penduduk dunia lainnya.

Ketimpangan, lanjut Kim, bisa ditekan dengan memacu pemerataan kesejahteraan ekonomi yang menyentuh kelompok masyarakat berpendapatan rendah di negara-negara berkembang, bukan hanya segelintir orang kaya.

"Tujuan kita memeratakan kesejahteraan bisa diraih dengan menaikkan upah, menciptakan lapangan kerja, memberikan anak-anak pendidikan dan menyediakan akses makanan, air, serta layanan kesehatan," tandas Kim.

[rizky@mediaindonesia.com](mailto:rizky@mediaindonesia.com)

**Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia semakin parah dan meningkat dalam satu dekade, terutama Jawa dan luar Jawa. bila tidak segera ditanggulangi ketimpangan tersebut akan menimbulkan gejala sosial**

Hashtag Berita :  
 #PertumbuhanEkonomi #PenghasilanMasyarakat #TarahidupLayak

subscribe dan download aplikasi Android & iOS di : www.ift.co.id

DECIDE NOW

Untuk berlangganan koran Indonesia Finance Today hubungi 021-700 95499

idea  
Bloomberg  
Businessweek

# INDONESIA FINANCE TODAY

DECIDE NOW

Senin, 6 Oktober 2014

Halaman 6, Kolom 1-5

## Keyakinan Konsumen Menurun Antisipasi Kenaikan Harga

Konsumen merasa khawatir terhadap naiknya harga pada musim paceklik.

Dusep Malik

JAKARTA - Kekhawatiran kenaikan harga-harga pada Desember 2014 menjelang hari raya Natal dan tahun baru, serta kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan LPG (Liquefied Petroleum Gas) 12 Kg membuat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2014 turun menjadi 119,8 dari bulan lalu sebesar 120,2, berdasarkan survei Bank Indonesia (BI).

Penurunan IKK September 2014 juga akibat kekhawatiran konsumen terhadap kebijakan pemerintah yang akan mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam enam bulan ke depan. Kebijakan tersebut diperkirakan akan meningkatkan harga-harga barang dan memberatkan konsumen.

Selain itu, berdasarkan dua komponen utama pembentuk IKK September 2014 tercatat Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) mengalami penurunan sebesar 1,1 poin dari sebelumnya 123,7 sedangkan Indeks Kondisi Saat Ini (IKI) meningkat sejak Juli 2014 menjadi sebesar 115,8 atau meningkat 0,2 poin dari bulan lalu.

Survei IEK yang mencatatkan penurunan disebabkan kondisi ekonomi enam bulan ke depan mengalami pelemahan khususnya ekspektasi terhadap kegiatan usaha dan penghasilan yang masing-masing turun sebesar 5,3 poin dan 0,1 poin menjadi 121,3 dan 135,6.

Indeks Kepercayaan Konsumen 2014

Veri Bank Indonesia		Danareksa	
116,7	Januari	94,1	
116,2	Februari	91,9	
118,2	Maret	89,9	
113,9	April	94,8	
116,9	Mei	95,1	
116,3	Juni	94,8	
119,8	Juli	98,2	
120,2	Agustus	99,8	
119,8	September	0	

Sumber: Danareksa Research Institute dan BI

Pelemahan tersebut akibat dampak tingginya inflasi dari kenaikan harga BBM subsidi yang akan dilakukan pemerintah.

Sementara itu, untuk survei IEK masih mencatatkan peningkatan yang ditopang penguatan Indeks Ketepatan Waktu Pembelian Barang Tahan Lama dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja yang masing-masing naik sebesar 1,9 poin dan 1,1 poin menjadi 112,6 dan 104,3.

Sedangkan, Indeks Ekspektasi Harga tercatat meningkat dalam tiga dan enam bulan ke depan mengikuti Indeks Ekspektasi Konsumen. Tercatat indeks ekspektasi harga tiga bulan mendatang naik 19,9 poin dari bulan sebelumnya

menjadi 177,2 dan Indeks Ekspektasi Harga enam bulan mendatang naik 4,5 poin menjadi 175,8.

Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, mengatakan penurunan IKK September 2014 bisa dikatakan musiman, biasanya konsumen merasa khawatir terhadap naiknya harga pada musim paceklik dan juga khawatir terhadap kondisi politik dalam negeri khususnya yang terjadi di parlemen beberapa waktu ini.

Menurut Purbaya, IKK turun tipis bisa dibalang fiat, kondisi ekonomi saat itu tidak membaik dan juga tidak memburuk sehingga ke depan konsumen akan sangat bergantung dengan kebijakan yang



Kekhawatiran konsumen yang meningkat terhadap kondisi ekonomi ke depan menyebabkan kepercayaan konsumen menurun.

akan diambil oleh pemerintah. IKK tentu akan kembali naik apabila kekhawatiran terhadap kenaikan BBM subsidi benar dilakukan pemerintah.

"Ini turun tipis karena berhubungan dengan harga dan keributan di parlemen mengganggu confidence, selain itu masuknya musim paceklik juga biasa menurunkan Indeks. Dua alasan turunnya IKK September itu masih jadi alasan sementara, sedangkan jika BBM naik IKK akan turun dalam dan diharapkan pemerintah bisa jadi momentum," terangnya.

David Sumual, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), mengatakan turunnya IKK pada September 2014 lebih didorong ekspektasi konsumen pada tiga dan enam bulan mendatang. Pasalnya, dalam periode tersebut konsumen merasa

pesimistis terhadap kondisi pendapatan dan lapangan kerja.

Selain itu, mulai pesimisnya konsumen dalam enam bulan mendatang menandakan bahwa perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini mulai berdampak terhadap konsumsi, sehingga pemerintah perlu memperhatikan hal tersebut. IKK diperkirakan akan turun semakin dalam jika kondisi politik dan global semakin tidak baik.

"Ekspektasi konsumen turun dalam enam bulan ke depan menandakan perlambatan pertumbuhan ekonomi sudah mulai berdampak ke konsumsi, sehingga konsumen pesimis terhadap tingkat pendapatannya, kondisi ini juga akan berlanjut jika kondisi politik dan global berlanjut ditambah rencana kenaikan BBM dan TTL," pungkasnya. ◆

**Konsumen merasa khawatir terhadap naiknya harga pada musim paceklik dan kekhawatiran kenaikan harga-harga seperti Tarif Dasar Listrik dan Gas 12 Kg membuat indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun, berdasarkan survei Bank Indonesia**

Hashtag Berita :

#StabilitasEkonomiNasional #SubsidiBahanBakarMinyak #DayaBeliMasyarakat



Semin, 6 Oktober 2014

Halaman 7, Kolom 1-5

# Struktur Belanja Negara akan Ditinjau Ulang



Defisit anggaran 2015 akan dialokasikan untuk kegiatan produktif. 0100-000-010

*Pada pemerintahan mendatang, defisit hanya untuk mendorong sektor yang sangat strategis.*

J. Edo Nur Karena

JAKARTA – Pemerintah baru akan meninjau ulang struktur belanja negara pada pemerintahan mendatang. Ke depan, defisit anggaran tidak lagi terdistribusi secara merata pada seluruh pos belanja pemerintah.

Hasto Kristianto, Deputi Tim Transisi Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menilai struktur belanja pemerintah saat ini perlu diubah. Sebab,

defisit anggaran belum bisa dimaksimalkan untuk sektor produktif maupun peningkatan belanja infrastruktur.

"Filosofi belanja pemerintah harus diubah. Dalam merancang APBN, pemerintah harus menyertakan komitmen untuk menyeimbangkan dengan belanja yang dikeluarkan," kata Hasto di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pada APBN 2015 yang disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), total belanja pemerintah mencapai Rp 2.039,5 triliun sementara pendapat negara hanya Rp 1.793,6 triliun. Defisit anggaran mencapai Rp 245,9 triliun atau 2,21% dari produk domestik heuto (PDB).

## Postur APBN 2015

Dalam triliun rupiah

	RAPBN	Kesepakatan Panjang	Postur APBN
<b>A. Pendapatan Negara</b>	1.762,30	1.793,60	1.793,60
<b>I. Pendapatan Dalam Negeri</b>	1.756,90	1.790,3	1.790,30
1. Penerimaan Perpajakan	1.370,80	1.380,00	1.380,00
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	388	410,3	410,3
<b>II. Hibah</b>	3,4	3,3	3,3
<b>B. Belanja Negara</b>	2.019,90	2.017,60	2.039,50
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	1.379,90	1.370,6	1.392,40
1. Belanja K/L	600,6	601,1	647,3
2. Belanja Non K/L	779,3	769,5	745,1
II. Transfer Daerah dan Dana Desa	640	647	647
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	-103,5	-70,2	-93,9
<b>D. Surplus/Defisit Anggaran</b>	-257,6	-224	-245,9
<b>% Defisit Terhadap PDB</b>	-2,32	-2,01	-2,21
<b>E. Pembiayaan (+/-)</b>	257,8	273,8	245,9
% Pembiayaan Terhadap PDB	2,32	2,46	2,21
<b>I. Pembiayaan Dalam Negeri</b>	281,4	297,6	269,7
<b>II. Pembiayaan Luar Negeri (netto)</b>	-23,8	-23,8	-23,8
<b>Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan</b>	0	0	0

Sumber: Hasil kesepakatan Rasio Anggaran dengan Pemerintah

Menurut Hasto, pemerintah tidak bisa mengandalkan utang untuk membayar belanja rutin negara. Dia juga mengungkapkan presiden terpilih Joko Widodo memiliki komitmen untuk menekan utang pemerintah.

Dalam APBN 2015, pembiayaan anggaran untuk menutup defisit berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp 254,9 triliun dan pembiayaan non utang sebesar negatif Rp 9 triliun. Pemerintah juga menyiapkan beberapa langkah antisipasi seperti men-

gendalikan rasio utang terhadap PDB, pembiayaan utang untuk sektor produktif, dan penerbitan sukuk berbasis proyek.

Hasto mengungkapkan pada pemerintahan mendatang, defisit hanya untuk mendorong sektor yang sangat strategis. "Defisit harus dengan nomenklatur yang jelas. Tidak bisa defisit terdistribusi secara proporsional," kata Hasto.

Arif Budimanta, Anggota Kelompok Kerja APBN Tim Transisi, mengungkapkan berdasarkan undang-undang, APBN memang

harus diusahakan agar seimbang. Namun, defisit anggaran tidak di-haramkan asal diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, dia menilai pemerintah baru sulit melaksanakan kebijakan anggaran berimbang dalam beberapa tahun mendatang sebab target pertumbuhan ekonomi dipatok tinggi. Presiden Terpilih Joko Widodo menginginkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dapat dicapai dalam lima tahun mendatang.

Tantangan yang dihadapi pemerintah baru, menurut Arif, antara lain adalah upaya memperluas ruang fiskal dalam rangka mencapai swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, dan kemandirian energi. Meski demikian, dia menjamin belanja negara akan semakin efektif dari waktu ke waktu.

"Kita akan menetapkan indikator-indikator pencapaian, seperti turunnya biaya logistik dalam beberapa tahun mendatang. Belanja negara harus kelihatan kerjanya dengan jelas," kata Arif.

Muhammad Faisal, Ekonom Centre of Reform on Economics, mengusulkan agar pemerintah baru memisahkan belanja rutin dengan belanja pembangunan. Upaya ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja negara.

Faisal berpendapat belanja pemerintah perlu diseimbangkan dengan penerimaan negara. Selanjutnya, defisit anggaran dapat didistribusikan kepada prioritas pembangunan pemerintah yang ada di beberapa kementerian.

"Pemerintah baru harus fokus pada sektor tertentu karena ada keterbatasan fiskal. Misalnya saja, pemerintah bisa dorong industri otomotif supaya *trade balance* kita tidak defisit," kata Faisal. Namun, dia menilai upaya mengubah struktur belanja pemerintah ini baru dapat dilakukan paling cepat pada 2016. ♦

**Pada pemerintahan mendatang, defisit hanya untuk mendorong sektor yang sangat strategis. pemerintah baru akan meninjau ulang struktur belanja negara pada pemerintahan mendatang**

Hashtag Berita :

#TransisiPemerintahan

#APBN2015

#RKP(RencanaKerjaPemerintahan)

#PembelanaanNegara